

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. 2011. *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Djafar, Muhammad., dan Rohana Huseng. 2008. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Fajar ND, Mukti., dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartanto, J. Andy. 2014. *Hukum Pertanahan : Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*. LaksBang Justitia. Surabaya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kadir, Abdul. 2016. *Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia*. Pustaka Bangsa Press. Medan.
- Pandiangan, Roristua. 2015. *Hukum Pajak*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 1986. *Hukum Pajak Internasional Indonesia*. PT.Eresco. Bandung.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. PT. Eresco. Bandung.

- Soemitro, Rochmat., dan Dewi Kania Sugiharti. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Refika Aditama. Bandung.
- Sudiyat, Imam. 1999. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty. Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria. S.W. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Suparno. 2012. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Pustaka Magister Semarang CV. Elangtuo Kinasih. Semarang.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Atas Jual Beli Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916)

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 35)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Tak Berwujud untuk Tujuan Perpajakan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

Standar Operasional Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (SSPD BPHTB) Nomor 973 yang disahkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman pada 31 Januari 2017.

C. Kamus

Andrae, Fockema. 1983. *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. T.Tp : Binacipta.

Bryan A., Garner (Ed). 1999. *Black's Law Dictionary*. T.Tp: Thomson.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ke 2. Balai Pustaka. Jakarta.

D. Jurnal

Hutagalung, Arie S. 2000. "Penerapan Lembaga *Rechtsverweking* untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah". *Majalah Hukum dan Pembangunan*. Nomor 4, Edisi Oktober-Desember. 2000.

Prasawaty, Herina., dan Tri Setyoningsih. 2015. *Kajian Perluasan Cakupan Pelaksanaan Survei Harga Properti Residensial Pasar Sekunder*. Bank Indonesia. Jakarta.

E. Penulisan Hukum

Heriyanto. 2016. *Efektivitas Harga Zona Nilai Tanah Pada Kantor Pertanahan Terhadap Nilai Transaksi Dalam Akta Jual Beli Tanah yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Palembang*. Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang, Sumatera Selatan.

I Made Sugiarta. 2015. *Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli di Kabupaten Bangli (Setelah berlakunya Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1/SE-100/I/2013 tentang Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.

Luh Devy Larasati. 2016. *Freies Ermessen Dinas Pendapatan Daerah Tentang Verifikasi Nilai Objek Pajak Dalam Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Sebagai Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Badung*. Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

F. Internet

Website resmi *bpn.go.id*, diakses pada Selasa, 23 Januari 2018 pukul 19.32 WIB.

Website *tribun news* dengan alamat website yakni <https://www.google.com/amp/jogja.tribunnews.com/amp/2016/08/22/bphtb-tetap-jadi-andalan-pendapatan-sleman> diakses pada Senin, 18 September 2017 pukul 15.34 WIB.

Website resmi Pemerintah Kabupaten Sleman dengan alamat www.slemankab.go.id diakses pada Selasa, 10 Juni 2018 pukul 16.02 WIB.

Website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman dengan alamat www.slemankab.bps.go.id diakses terakhir pada Selasa, 10 Juni 2018 pukul 16.18 WIB.